

## FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN OLEH PESERTA MANDIRI PADA UNIT RAWAT JALAN PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES TAHUN 2023

Hafsha Rosdiana<sup>1</sup>, Dwi Nurmawaty<sup>2</sup>, Ade Heryana<sup>3</sup>, Ahmad Irfandi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul

### Article History

Received : Agustus 2023  
Revised : September 2023  
Accepted : September 2023  
Published : Oktober 2023

**Corresponding author\*:**  
hafsha76@gmail.com

**No. Contact:**  
081511991017

### Cite This Article:

H. Rosdiana, D. Nurmawaty, A. Heryana, and A. Irfandi, "FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN OLEH PESERTA MANDIRI PADA UNIT RAWAT JALAN PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES TAHUN 2023", JUKEKE, vol. 2, no. 3, pp. 1-6, Okt. 2023.

### DOI:

<https://doi.org/10.56127/juke.v2i2.899>

**Abstract:** The increasing number of BPJS health membership in Indonesia has not been accompanied by participant compliance in paying BPJS health contributions, especially in the self-employed segmentation. Based on a preliminary study at the Kalideres District Health Center, it was found that 7 out of 10 independent health BPJS participants were not compliant in paying contributions. The purpose of this study was to determine the factors related to compliance with paying BPJS health contributions by independent participants at the outpatient unit at the Kalideres District Health Center in 2023. This research was a quantitative study with a cross-sectional design. Data analysis used chi-square test. The results showed that there was a relationship between the variables of knowledge ( $p=0.005$ ), income ( $p=0.000$ ), and perceived benefits of BPJS for health ( $p=0.003$ ) with compliance with paying BPJS health contributions by independent participants at the outpatient Unit of the Kalideres District Health Center.

**Keywords:** National health insurance, Social Security Administrator (BPJS) Health, compliance, knowledge, income, perception.

**Abstrak:** Meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS kesehatan di Indonesia tidak dibarengi dengan kepatuhan peserta dalam membayar iuran BPJS kesehatan Mandiri khususnya pada segmentasi pekerja mandiri. Berdasarkan studi pendahuluan pada Puskesmas Kecamatan Kalideres ditemukan 7 dari 10 peserta BPJS kesehatan mandiri tidak patuh dalam membayar iuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan oleh peserta mandiri pada unit rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Analisis data yang digunakan ialah uji *chi-square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara variabel pengetahuan ( $p=0,005$ ), pendapatan ( $p=0,000$ ), dan persepsi manfaat BPJS kesehatan ( $p=0,003$ ) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan oleh peserta mandiri pada Unit Rawat Jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

**Kata Kunci:** JKN, BPJS kesehatan mandiri, kepatuhan, pengetahuan, pendapatan, persepsi.

### PENDAHULUAN

Pembiayaan kesehatan merupakan hal yang mendasar atau fundamental dalam pembangunan kesehatan di suatu negara termasuk Indonesia. Pembiayaan kesehatan merupakan besaran dana yang ada atau tersedia untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan baik untuk perorangan, keluarga, ataupun kelompok masyarakat [1]. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembiayaan kesehatan di Indonesia ialah dengan menginisiasikan jaminan kesehatan nasional (JKN). Berdasarkan Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menjelaskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah [2]. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwujudkan dengan dibentuknya suatu badan hukum yang ditujukan untuk melaksanakan program jaminan kesehatan yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2014 [3]. Kepesertaan BPJS kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Salah satu peserta Non-PBI ini ialah pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri yang mana peserta harus membayarkan iuran BPJS kesehatan sendiri (secara mandiri) setiap bulannya yang mana paling lambat tanggal 10 setiap bulannya [4].

Jumlah kepesertaan BPJS kesehatan di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan BPJS kesehatan mencatat kepesertaan BPJS pada tahun 2020 yakni 222.46 juta (82,07%),

kemudian meningkat pada tahun 2021 sebanyak 235,71 juta (86,96%), meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 248,77 juta (91,77%), dan pada bulan April 2023 kepesertaan BPJS kesehatan sebanyak 254,14 juta (93,76%) [5]. Namun, peningkatan jumlah peserta BPJS kesehatan tidak diiringi dengan kepatuhan peserta BPJS kesehatan khususnya peserta mandiri dalam membayar iuran. Hal ini digambarkan dengan banyaknya kartu peserta yang sudah tidak aktif karena menunggak. Berdasarkan data terkait status keaktifan kartu kepesertaan BPJS mandiri yang diperoleh dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial Dewan Jaminan Sosial Nasional Sosial (SISMONEV-DJSN) dimana data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mendominasi angka kepesertaan BPJS yang sudah tidak aktif dimana pada tahun 2022 sebesar 15,67 juta jiwa (51%) menunggak iuran dan meningkat pada April 2023 yang sudah tidak aktif kepesertaannya (menunggak iuran) sebesar 48,25 juta jiwa (76,1%). Artinya terjadi kenaikan angka kepesertaan mandiri yang sudah tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) [6]. Sehingga hal ini menyebabkan BPJS kesehatan selalu mengalami defisit setiap tahunnya pada tahun 2019 defisit BPJS kesehatan mencapai 51 triliun dan pada tahun 2020 walaupun defisitnya menurun namun tetap ada yakni sebesar 5,69 triliun [7].

Hal ini terjadi karena pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah memiliki kemungkinan untuk tidak patuh dalam membayar iuran BPJS kesehatan mandiri dibanding dengan pekerja yang memiliki pekerjaan formal (pekerja penerima upah) karena pada pekerja formal pembayaran iurannya dilakukan oleh pemberi kerja dengan memotong pendapatan pekerja setiap bulannya. Konsisten atau keberlanjutan pembayaran iuran bagi peserta mandiri merupakan tantangan dalam mensukseskan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia [8]. Meskipun kepesertaan BPJS kesehatan terus meningkat tetapi masih terdapat masalah pada pembayaran iuran, penggunaan kartu serta keaktifan kartu yang dimiliki setiap peserta maka perlu tidak lanjut yang harus dilakukan oleh segala pihak [9].

Permasalahan terkait kepatuhan peserta BPJS kesehatan juga terjadi di Puskesmas kecamatan Kalideres. Berdasarkan data Laporan tahunan Puskesmas Kecamatan Kalideres dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kunjungan dari pasien BPJS mandiri dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2020 jumlah kunjungan pasien BPJS mandiri sebesar 21.066 pasien (19,9%), kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 20.978 pasien (17,5%). Kemudian pada tahun 2022 terdapat penurunan kunjungan kembali pada pasien BPJS mandiri yakni 20.351 dan sepanjang tahun 2023 terjadi perubahan angka kunjungan pasien BPJS kesehatan mandiri yang signifikan menurun, dimana pasien lama BPJS mandiri dari Januari – Maret cenderung menurun angka kunjungan setiap bulannya, pada bulan Januari (2.152 pasien) – Februari (1.828 pasien) terdapat penurunan sebesar 324 pasien, kemudian dari bulan Februari (1.828 pasien) – Maret (1.579 pasien) terdapat penurunan sebesar 249 pasien. Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta BPJS mandiri.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari petugas Pusat Data dan Informasi yang menyatakan bahwa dalam sehari sering ditemui pasien BPJS mandiri yang kartu kepesertaannya sudah tidak aktif (menunggak) dan merubah cara pembayaran menjadi pasien umum (out of pocket) untuk tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, dan terdapat juga pasien yang tidak melanjutkan pengobatan karena kepesertaan yang tidak aktif. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi peserta mandiri dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan mandiri sehingga membuat kartu kepesertaan BPJS kesehatan mandirinya menjadi tidak aktif. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan ditemukan bahwa peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran menyatakan bahwa mereka tidak terlalu mengetahui terkait JKN dan BPJS kesehatan dapat dikatakan pengetahuan mereka terbatas terkait hal ini, selain itu juga di karena mereka memiliki pendapatan yang tidak tetap, serta persepsi mereka terkait manfaat BPJS kesehatan yang masih dapat dikatakan tergolong kurang, karena mereka merasa jarang menggunakan kartu BPJS kesehatan sehingga manfaat yang dirasakan oleh mereka juga hanya sedikit.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Oleh Peserta Mandiri Pada Unit Rawat Jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres Tahun 2023”.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan design studi *cross sectional*. Variabel independen pada penelitian ini ialah pengetahuan, pendapatan, dan persepsi manfaat BPJS kesehatan. Kemudian, variabel dependennya ialah kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri. Kepatuhan membayar iuran merupakan perilaku peserta BPJS kesehatan mandiri dalam membayar iuran berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh BPJS yaitu patuh jika membayar iuran setiap tanggal 1-10 setiap bulannya dan tidak patuh jika membayar iuran lebih dari tanggal 10 setiap bulannya. Variabel pengetahuan dilihat dari pengetahuan tinggi jika skor  $\geq 7,00$ , pengetahuan rendah  $< 7,00$ . Tingkat pendapatan dilihat berdasarkan UMK DKI Jakarta tahun 2023 yakni  $\geq 4.901.798$  dan  $< 4.901.798$ . variabel persepsi manfaat BPJS kesehatan dikatakan persepsi positif apabila skor  $\geq 22,00$ , persepsi negatif jika  $< 22,00$ .

Penelitian ini dilakukan pada unit rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni – Juli 2023. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh pasien BPJS kesehatan mandiri yang berobat pada Puskesmas Kecamatan Kalideres. Sampel yang digunakan sebanyak 62 orang yang mana jumlah ini berdasarkan hasil perhitungan sampel dengan rumus 2 (dua) proporsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang mana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria inklusi meliputi responden merupakan peserta BPJS kesehatan mandiri yang melakukan pengobatan di unit rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres, responden berusia 18 tahun ke atas atau bukan usia sekolah. Kemudian, untuk kriteria eksklusi meliputi responden yang tidak bisa membaca atau buta huruf dan responden tidak bersedia menjadi responden.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapatkan langsung dari proses pengisian kuesioner dan wawancara oleh responden. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari aplikasi *mobile JKN* untuk melihat riwayat pembayaran iuran BPJS kesehatan Mandiri yang dilakukan oleh responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid dan reliabel berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan menggunakan aplikasi olah data SPSS. Data yang didapatkan dari hasil penelitian ini kemudian akan dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji *chi-square*. Penelitian ini telah lolos kaji etik (*ethical approval*) Universitas Esa Unggul dengan nomor 0923-07.056 /DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VII/2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 62 responden yang patuh dalam membayar iuran sebanyak 35 orang (56,5%) dan responden yang tidak patuh dalam membayar iuran sebanyak 27 orang (43,5%). Responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 37 orang (59,7%) sedangkan responden yang memiliki pengetahuan rendah sebanyak 25 orang (40,3%). Responden yang memiliki pendapatan dibawah UMR ( $< \text{UMR}$ ) sebanyak 33 orang (53,2%) dan responden yang memiliki pendapatan lebih sama dengan UMR ( $\geq \text{UMR}$ ) sebanyak 29 orang (46,8%). Responden yang memiliki persepsi manfaat BPJS kesehatan negatif sebanyak 26 orang (41,9%) dan responden yang memiliki persepsi manfaat BPJS kesehatan positif sebanyak 36 orang (58,1%).

Pada tabel 2 menunjukkan analisis bivariat dari variabel dependen yakni pengetahuan, pendapatan, dan persepsi manfaat BPJS kesehatan dengan variabel independen yakni kepatuhan membayar iuran oleh peserta mandiri. Tabel 2 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan ( $p\text{-value}=0,005$ ), pendapatan ( $p\text{-value}=0,000$ ), dan persepsi manfaat BPJS kesehatan ( $p\text{-value}=0,003$ ) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan oleh peserta mandiri pada unit rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres tahun 2023.

Pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan oleh seseorang yang dapat meningkatkan pemahamannya terhadap informasi yang diperoleh [10]. Perubahan perilaku yang didasari dengan pengetahuan dan kesadaran dari diri sendiri maka akan membuat perilaku bersifat langgeng (*long lasting*) dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan [11]. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran dengan  $p\text{-value} 0,005$  dengan PR 95% CI sebesar  $1.973 > 1$  yang mana artinya responden dengan pengetahuan rendah memiliki risiko untuk tidak patuh dalam membayar iuran. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Lawrence Green yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu predisposisi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dalam hal ini perilaku untuk melakukan pembayaran iuran tepat sesuai dengan aturan yang berlaku [12]. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Tamamaung dimana terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri [13]. Penelitian lain yang sejalan ialah penelitian yang dilakukan di Kota Depok tahun 2019 yang mana adanya hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN dengan  $p\text{-value} = 0,019$  [8].

Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan didapatkan bahwa dari 25 responden yang memiliki pengetahuan rendah didapatkan 20 responden tidak patuh dalam membayar iuran, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 37 orang, dari 37 orang tersebut yang memiliki perilaku patuh dalam membayar iuran sebanyak 22 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tinggi yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan untuk lebih patuh dalam membayar iuran dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang memiliki pengetahuan rendah, mereka memang jarang dengan sengaja mencari informasi terkait JKN sehingga membuat pengetahuan mereka menjadi kurang, mereka juga menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui jika puskesmas menyediakan leaflet terkait JKN.

Pendapatan merupakan penghasilan total setiap bulannya yang didapatkan oleh responden [14]. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan

kepatuhan membayar iuran dengan p-value 0,0004 dengan PR 95% CI sebesar 2.359 yang artinya pendapatan merupakan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar iuran BPJS kesehatan mandiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo yang menunjukkan menyatakan bahwa hubungan pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN dengan p-value=0,047 [11]. Penelitian lain yang mendukung ialah penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kertasema Kabupaten Indramayu tahun 2022 dimana menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan per bulan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Mandiri [15].

Berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat bahwa dari 33 responden yang memiliki pendapatan < UMR, 26 orang tidak patuh membayar iuran dan 7 orang patuh membayar. Sedangkan, terdapat 29 responden yang memiliki pendapatan  $\geq$  UMR dimana 9 orang tidak patuh membayar iuran dan 20 orang patuh membayar. Kemudian, berdasarkan wawancara kepada responden dimana pekerjaan mereka mayoritas sebagai pedagang dan pekerja ojek online yang mana penghasilan yang mereka dapatkan setiap harinya tidak menentu dan rata-rata kurang dari kurang dari UMR kota Jakarta. Jenis pekerjaan seseorang berhubungan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan seperti pekerjaan informal yang pendapatannya tidak tetap seperti pekerjaan formal [13]. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rendah yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi perilaku patuh dan tidak patuh dalam membayar iuran BPJS kesehatan mandiri. Sebagaimana menurut Fardiansyah, Yuniarti, dan Agnestri (2021) menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki penghasilan rendah akan lebih mengutamakan kebutuhan primer atau sehari-harinya dibanding untuk membayar iuran BPJS kesehatan mandiri, serta pendapatan seseorang memegang peranan utama terhadap tingginya kesadaran seseorang terhadap kepatuhan untuk membayar iuran BPJS kesehatan mandiri [11].

**Tabel 1.** Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Membayar, Pengetahuan, Pendapatan, dan Persepsi Manfaat BPJS Kesehatan

Variabel	Frekuensi (n=62)	Proporsi (%)
Kepatuhan Membayar		
Tidak Patuh	27	43,5%
Patuh	35	56,5%
Pengetahuan		
Rendah	25	40,3%
Tinggi	37	59,7%
Pendapatan		
< UMR	33	53,2%
$\geq$ UMR	29	46,8%
Persepsi Manfaat BPJS Kesehatan		
Negatif	26	41,9%
Positif	36	58,1%

**Tabel 2.** Hubungan Pengetahuan, Pendapatan, dan Persepsi Manfaat BPJS Kesehatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Oleh Peserta Mandiri Pada Unit Rawat Jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres Tahun 2023

Variabel	Kepatuhan Membayar Iuran				Total		P-value	PR 95% CI
	Tidak Patuh		Patuh		N	%		
	n	%	n	%				
Pengetahuan								
Rendah	20	80	5	20	25	100	0,005	1.973 (1.275-3.054)
Tinggi	15	40,5	22	59,5	37	100		
Pendapatan								
< UMR	26	78,8	7	21,2	33	100	0,0004	2.539 (1.435-4.492)
$\geq$ UMR	9	31	20	69	29	100		
Persepsi Manfaat BPJS Kesehatan								
Negatif	21	80,8	5	19,2	26	100	0,003	2.077 (1.324-3.259)
Positif	14	38,9	22	61,1	36	100		

Persepsi terkait manfaat BPJS kesehatan yang diberikan pada pelayanan kesehatan yang tidak sesuai atau kurang baik, seperti adanya tambahan biaya obat yang dialami peserta namun tidak ada penjelasan mendetail yang diberikan kepada peserta, kamar rawat inap yang tidak sesuai dengan hak kelas rawat peserta, antrian yang panjang dan perbedaan perlakuan antara peserta JKN dengan pasien umum yang dialami oleh peserta dapat mempengaruhi konsistensi peserta dalam membayar iuran secara rutin [13]. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa adanya hubungan yang signifikan antara persepsi manfaat BPJS kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran dengan p-value 0,003 dengan PR 95% CI sebesar 2.077 dimana artinya responden yang memiliki persepsi terkait manfaat BPJS kesehatan negatif berisiko untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar iuran BPJS kesehatan mandiri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari tahun 2021 dimana menyatakan bahwa adanya hubungan persepsi manfaat BPJS kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS kesehatan mandiri [16]. Penelitian lain yang mendukung ialah penelitian yang dilakukan pada Di Puskesmas Lubuk Basung Kab. Agam menggambarkan bahwa adanya hubungan hubungan persepsi ( $p=0,000$ ) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri [17].

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat 26 responden yang memiliki persepsi negatif, dimana 21 orang tidak patuh membayar iuran dan 5 orang patuh dalam membayar iuran. Sedangkan, terdapat 36 responden yang memiliki persepsi positif dimana 14 orang tidak patuh dalam membayar iuran dan 22 orang patuh dalam membayar iuran. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa persepsi manfaat BPJS kesehatan yang positif dapat mempengaruhi konsistensi peserta BPJS kesehatan mandiri dalam membayar iuran.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan responden, didapatkan bahwa responden merasa kurangnya manfaat keuangan dan perlindungan kesehatan yang diberikan oleh BPJS kesehatan yang mana dilihat dari masih adanya responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju terkait manfaat keuangan yang diberikan oleh BPJS kesehatan. Hal ini dikarenakan beberapa dari mereka beranggapan penyakit yang diderita bukan termasuk penyakit kronis (parah) jadi manfaat keuangan tidak terlalu dirasakan dan terdapat juga yang menyampaikan bahwa manfaat BPJS kesehatan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan fasilitas kesehatan, terdapat responden yang beranggapan bahwa terkadang pelayanan BPJS kesehatan dipersulit dalam hal administrasi terlebih ketika meminta rujukan. Sehingga hal ini membuat mereka tidak rutin dan tepat waktu dalam membayar iuran BPJS kesehatan mandiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan ( $p=0,005$ ), pendapatan ( $p=0,000$ ), dan persepsi manfaat BPJS kesehatan ( $p=0,003$ ) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan oleh peserta mandiri pada Unit Rawat Jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres tahun 2023.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah pihak BPJS kesehatan diharapkan dapat bekerjasama dengan puskesmas untuk melakukan edukasi terkait JKN terlebih terkait pelayanan yang dijamin oleh JKN sehingga masyarakat dapat tertarik untuk rutin membayar iuran karena informasi yang dimilikinya meningkat, puskesmas dan BPJS kesehatan bersinergi untuk selalu memperbaiki pelayanan yang diberikan khususnya kepada peserta BPJS kesehatan mandiri agar meningkatkan konsistensi peserta dalam membayar iuran. Peserta BPJS kesehatan mandiri sebaiknya memanfaatkan pembayaran *auto debit* agar tidak terlewat pembayaran iuran setiap bulannya. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat bekerjasama langsung dengan BPJS kesehatan agar informasi dan data yang didapatkan lebih banyak dan akurat.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Puskesmas Kecamatan Kalideres, Ibu Dwi Nurmawaty, S.KM., M.KM yang selalu membimbing dalam penulisan jurnal ini, serta para dosen penguji yang memberikan saran dan masukan yang membangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. E. B. Setyawan, "Sistem Pembiayaan Kesehatan," *Saintika Med.*, vol. 11, pp. 119–126, 2015, doi: 10.1038/271360a0.
- [2] Kementerian RI, "Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional," *Peratur. Pres. Republik Indones.*, 2018.
- [3] C. R. A. Saputro and F. Fathiyah, "Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia," *J. Jaminan Kesehat. Nas.*, vol. 2, no. 2, pp. 204–216, 2022, doi: 10.53756/jjkn.v2i2.108.
- [4] D. N. Ananda, A. F. Aliyyah, C. N. Difhanny, and F. P. Gurning, "Analisis faktor-faktor yang

- mempengaruhi kepatuhan peserta Non-PBI dalam pembayaran iuran BPJS di Indonesia : Literature review,” *Naut. J. Ilm. Multidisiplin Indones.*, vol. 1, no. 6, pp. 452–459, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/378>
- [5] BPJS, “Laporan Pengelolaan Program Tahun 2021 dan dan Laporan Keuangan Tahun 2021.” 2022.
- [6] DJSN, “Dewan Jaminan Sosial Nasional,” 2023. [Online]. Available: <http://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/>
- [7] BPJS, “Laporan Pengelolaan Program Tahun 2019 dan Laporan Keuangan Tahun 2019.” p. 1, 2020.
- [8] J. Adani, P. Permatasari, R. M. Pulungan, and M. E. Setiawati, “Faktor - faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Depok Tahun 2019,” *J. Ilm. Kesehat. Masy.*, vol. 11, no. 3, pp. 287–295, 2019.
- [9] D. S. Marzuki, M. Y. Abadi, D. Darmawansyah, M. A. Arifin, S. Rahmadani, and M. Al Fajrin, “Analisis Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Peserta PBPU yang Menunggak Iuran JKN Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar,” *J. Manaj. Kesehat. Yayasan RS.Dr. Soetomo*, vol. 5, no. 2, p. 102, 2019, doi: 10.29241/jmk.v5i2.158.
- [10] F. Fajrini, N. Latifah, D. Hermansyah, and N. Firda, “Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018,” *muhammadiyah public Heal. J.*, vol. 1, p. 129, 2021.
- [11] A. Fardiansyah, A. M. Yuniarti, and P. Agnestri, “Faktor - faktor yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran JKN Pada Peserta Mandiri Di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo,” *Hosp. Majapahit*, vol. 13, no. 2, pp. 92–103, 2021.
- [12] S. Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Jakarta Rineka Cipta, 2014.
- [13] N. Hasan and A. S. Batara, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Tamamaung,” *Wind. Public Heal. J.*, vol. 01, no. 04, pp. 382–393, 2020, doi: <https://dx.doi.org/10.33096/woph.v1i4.233>.
- [14] S. K. Naha, R. W. Sirait, and Y. Kenjam, “Factors Related to Compliance in Paying Contribution Among National Health Insurance Mandiri Members in Oesapa Village, Kupang City,” *Media Kesehat. Masy.*, vol. 4, no. 3, pp. 378–386, 2022.
- [15] Murniasih, R. Suparman, M. Mamlukah, and E. Febriani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu Tahun 2022,” *J. Public Heal. Innov.*, vol. 3, no. 01, pp. 41–51, 2022, doi: 10.34305/jphi.v3i01.604.
- [16] Rahman, E. Y. Sukaria, and Suhadi, “Hubungan Persepsi Dengan Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan PBPU Di Wilayah Kerja Puskesmas Lepo-lepo Kota Kendari Tahun 2021,” *Pros. Fak. Kesehat. Masy. Univ. Haluoleo*, pp. 13–20, 2022.
- [17] M. Novita, S. Handayani, I. Y. Darma, and Edison, “Faktor - faktor yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Lubuk Basung Kab. Agam,” *J. Kesehat. Med. Sainatika*, vol. 13, pp. 204–217, 2022.